

DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TERHADAP PRODUKSI PADI DAN PENDAPATAN PETANI DI DESA JATI, KABUPATEN CIANJUR

IMPACT OF RURAL AGRIBUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM ON FARMER'S PADDY PRODUCTION AND REAL INCOME IN JATI VILLAGE, CIANJUR DISTRICT

Akhmadi

The SMERU Research Institute, Jl. Cikini Raya No. 10 A, Jakarta 10330.

Email: akhmadi@smeru.or.id

ABSTRACT

The national development implemented by the government aimed to improve the welfare of its citizens. Economic development is also intended to reduce poverty rate. Poverty rate in rural areas is higher than in urban areas. Rural Agribusiness Development Program (PUAP Program) aimed to reduce poverty in rural areas through development potential agribusiness. This research aimed to find impact of this program to increase rice production and real income farmers in two samples, Jati (receive PUAP Program) and Jamali (did not receive PUAP Program) villages, using Double-Difference Analysis. The result showed that the implementation of PUAP Program in Jati Village accordance with the guidance set and value of Double Difference of increasing rice production in Jati Village was 641.14 kilograms per hectare, while for real income was Rp 878.358 higher than in Jamali Village. It showed that PUAP Program had significantly increased rice production and farmers' income. PUAP Program has increased rice production and farmer's real income, however the average income/ capita/month of farmer in Jati Village was still under poverty line of Cianjur District. Weaknesses in the implementation of the PUAP Program are still dominant, so that the average of farmer's income/capita is still below the district's poverty line. Therefore, urgent efforts are needed to improve the quality of human resources through training and education on agribusiness management such as technical production and on-farm management.

Keywords: agribusiness, poverty, PUAP, rural development

ABSTRAK

Dalam dua dekade terakhir ini, tingkat kemiskinan di perdesaan selalu relatif lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan di perkotaan. Program PUAP merupakan salah satu program pengurangan kemiskinan di perdesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak Program PUAP terhadap produksi padi dan pendapatan riil petani di Desa Jati (penerima Program PUAP) dan Desa Jamali (tidak menerima Program PUAP), menggunakan analisis *Double Difference*. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan PUAP di Desa Jati telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan nilai *Double Difference* produksi padi per hektar (641,14 kg) dan pendapatan riil (Rp878.358) di Desa Jati lebih tinggi daripada di Desa Jamali. Hal ini menunjukkan bahwa Program PUAP telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi padi per hektar dan pendapatan petani. Namun dengan adanya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Program PUAP yang masih dominan dan rata-rata pendapatan per kapita petani penerima Program PUAP ternyata masih berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu diperlukan upaya mendesak untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi petani, pengurus Gapoktan, penyuluh, dan penyelia mitra tani melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan tentang usaha agribisnis, baik yang berkaitan dengan teknis produksi maupun manajemen usaha taninya.

Kata kunci: agribisnis, kemiskinan, perdesaan, PUAP

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia di berbagai sektor adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Upaya-upaya pemerintah yang dilakukan dengan berbagai program telah menunjukkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Pertumbuhan ekonomi yang positif ini juga diiringi dengan pergeseran kontribusi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi ini diiringi pula dengan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Makna kemiskinan dibedakan

menjadi dua macam yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

Kemiskinan kultural disebabkan adanya faktor-faktor budaya suatu daerah sehingga seseorang tetap miskin, sedangkan kemiskinan struktural disebabkan ketidakberdayaan seseorang terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil. Kemiskinan struktural terjadi karena orang atau sekelompok orang tidak memiliki daya tawar yang kuat terhadap sistem atau tatanan sosial yang ada, serta tidak adanya akses untuk dapat membebaskan diri dari belenggu tersebut (BPS, 2009a).

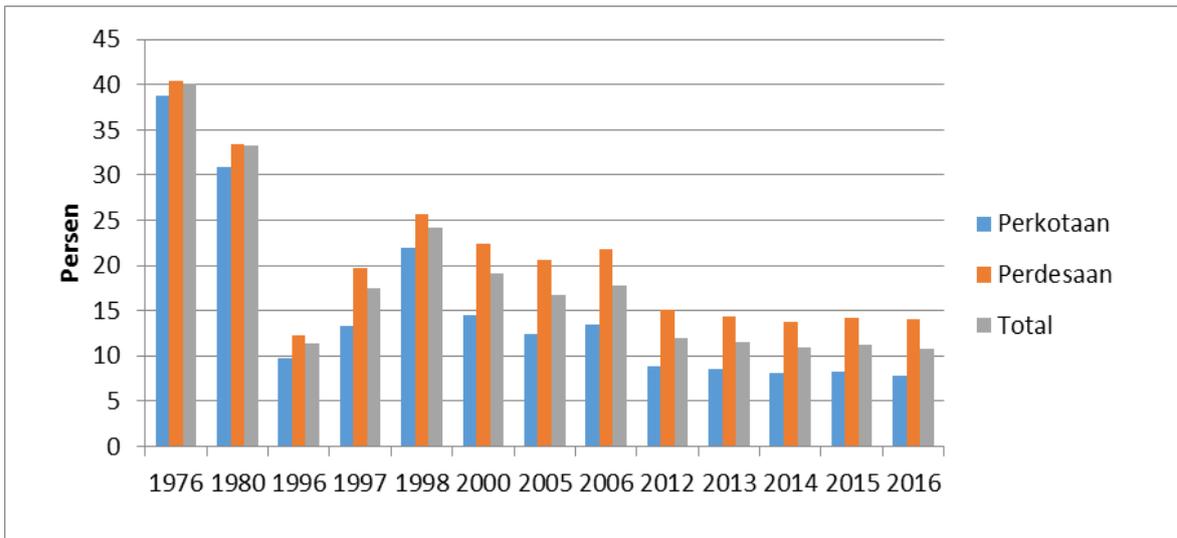
Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan bukannya tanpa masalah. Sebagai konsekuensi perekonomian yang bersifat terbuka, Indonesia tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global. Krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi yang melanda Asia pada 1997/1998 berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Krisis ini telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat tajam, baik secara absolut maupun persentase. Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin sebanyak 34,5 juta jiwa atau 17,65% meningkat menjadi 47,7 juta jiwa atau 23,43% pada 1999, serta berangsur-angsur turun menjadi 17,75% pada 2006, 15,42% pada 2008, dan bahkan tinggal 10,86% pada 2016 (Gambar 1).

Jika dilihat wilayah perkotaan dan perdesaan, maka tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan masih cukup tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan selalu lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan. Pada tahun 1970-an hingga awal 1990-an tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan hampir berimbang, namun setelah terjadinya krisis ekonomi 1997/1998 tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan selalu lebih besar dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan. Badan Pusat Statistik (Kementan, 2014) mencatat bahwa pada Maret 2013 tingkat kemiskinan turun menjadi 11,37% dibanding pada 2012 sebesar 11,66%. Persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 8,60% (2012) menurun menjadi 10,34% (2016), sedangkan penduduk miskin di perdesaan turun dari 14,70% (2012) menjadi 14,11% (2016). Sedangkan di Jawa Barat, Badan Pusat Statistik (BPS, 2010) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan pada 2009 sebesar 11,57% turun menjadi

8,95 persen pada 2016.

Data kemiskinan pada Maret 2016 menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 28,01 juta jiwa atau 10,86 persen dengan 7,79 persen penduduk miskin di perkotaan dan 14,11 persen di perdesaan. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak dialami penduduk perdesaan yang pada umumnya adalah petani. Dari total rakyat miskin di Indonesia, sekitar 66 persen berada di perdesaan dan sekitar 56 persen menggantungkan hidupnya dari pertanian. Padahal selama ini kebijakan pemerintah di bidang pertanian difokuskan kepada pencapaian swasembada pangan dan stabilitas harga, khususnya untuk komoditi beras (Godoy dan Dewbre, 2010). Padahal sektor pertanian merupakan komponen yang penting dari ekonomi perdesaan di negara-negara berkembang (Anriquez dan Stamoulis, 2007). Kemiskinan di perdesaan akan terus menjadi masalah pokok nasional sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi program prioritas untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K, 2012) mengategorikan Program Penanggulangan Kemiskinan ke dalam Kluster I, Kluster II, Kluster III, dan Kluster IV. Kluster I mencakup kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang mencakup Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk keluarga miskin (Raskin), dan bantuan siswa miskin (BSM). Kluster II mencakup kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan jenis program yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sedangkan Kluster III kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi kepada usaha mikro dan kecil diberikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kluster IV berupa Program Pro Rakyat yang menyediakan fasilitas dasar bagi masyarakat miskin dengan harga murah koordinasi pelaksanaan kegiatan sektoral pada wilayah tertentu. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis



Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, 1976-2016.
 Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai tahun.

Perdesaan (PUAP) yang termasuk ke dalam Klaster II.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan di perdesaan di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok pemberdayaan masyarakat. Program PUAP memberikan bantuan modal usaha bagi petani anggota kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumahtangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota.

Dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Tujuan Program PUAP adalah mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan, meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, memberdayakan kelembagaan petani, dan meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani (Sekretariat PUAP, 2012).

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu sentra penghasil padi di Jawa Barat, namun tingkat kemiskinan di Cianjur lebih besar daripada rata-rata tingkat kemiskinan di

Propinsi Jawa Barat.

Dalam kurun waktu 2002-2013, tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur tidak selalu menunjukkan penurunan. Sejak diluncurkan Program PUAP pada 2008, tingkat kemiskinan di Cianjur mengalami penurunan dari 15,38% (2008) menjadi 14,14% (2009), namun pada 2010 tingkat kemiskinan meningkat kembali menjadi 14,32% walaupun setelah itu menurun kembali (Tabel 1). Namun tingkat kemiskinan menurun kembali menjadi 13,82% (2011), demikian, pada tahun-tahun berikutnya 13,18% (2012), dan menjadi 12,02% (2013).

Untuk mengkaji dampak program penanggulangan kemiskinan di perdesaan terhadap pendapatan petani dilakukan studi kasus pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Program PUAP merupakan program penanggulangan kemiskinan di perdesaan di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri). Program PUAP memberikan bantuan modal usaha bagi petani anggota kelompok tani, yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Program PUAP bertujuan mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan melalui pengembangan usaha agribisnis yang sesuai

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cianjur

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (000)	Persentase (%)
2002	368,6	18,49
2003	388,8	19,05
2004	357,9	17,36
2005	369,4	17,57
2006	415,7	19,81
2007	394,6	18,49
2008	334,3	15,38
2009	311,1	14,14
2010	310,9	14,32
2011	306,6	13,82
2012	292,2	13,18
2013	267,9	12,02

Sumber: BPS, berbagai tahun

dengan potensi wilayah di perdesaan, meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, memberdayakan kelembagaan petani dan perdesaan, dan meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani untuk mengakses permodalan.

Sejak Program PUAP digulirkan pada 2008, telah dilakukan berbagai kajian tentang pelaksanaan Program PUAP. Penelitian yang dilakukan Anggriani menemukan bahwa dampak pelaksanaan Program PUAP mengakibatkan peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga petani penerima PUAP sebesar 12,86% (Anggriani, 2012). Namun saat dilakukan uji beda rata-rata terhadap pendapatan setelah Program PUAP antara kelompok anggota PUAP dan kelompok non anggota PUAP dihasilkan tidak berbeda nyata.

Oleh karena itu masih diperlukan penelitian untuk mengevaluasi dampak Program PUAP dengan membandingkan antara kelompok penerima bantuan Program PUAP (*a treatment group*) dengan kelompok pembanding (*a comparison group*) sebelum dan setelah Program PUAP, sehingga dapat diketahui seberapa besar dampak Program PUAP. Sementara itu, penelitian lain menunjukkan adanya kelemahan pelaksanaan Program PUAP. Kamira et al

menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir oleh Gapoktan (Kamira et al, 2011). Hasil penelitian Ariyanti menemukan bahwa Gapoktan belum berfungsi secara efektif (Ariyanti, 2011), dan penelitian Burhansyah menemukan bahwa kinerja penyaluran dana bantuan langsung masyarakat PUAP belum optimal (Burhansyah, 2010). Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk merumuskan dan memilih strategi terbaik penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

Pemerintah telah melakukan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan, antara lain melalui Program PUAP. Namun tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di perkotaan. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk mengkaji dampak Program PUAP terhadap produksi padi dan penerimaan riil petani di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan sebagai berikut, yaitu (1) apakah Program PUAP memiliki dampak yang nyata terhadap peningkatan produksi padi?; dan (2) apakah Program PUAP memiliki dampak yang nyata terhadap penerimaan riil bagi petani?

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dampak Program

PUAP terhadap produksi padi; dan (2) menganalisis dampak Program PUAP terhadap pendapatan petani padi.

METODE

Jenis data yang dikumpulkan adalah data berkala (*time series*), data kuantitatif, dan data kualitatif. Sumber data berasal dari data sekunder dan data primer. Data sekunder mencakup data desa-desa penerima Program PUAP di Kabupaten Cianjur, data tentang petani, baik petani penerima Program PUAP maupun petani bukan penerima Program PUAP. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Disperta) Kabupaten Cianjur, Penyuluh Pertanian, Penyelia Mitra Tani (PMT), dan Gapoktan. Selain itu, data juga dikumpulkan dari Badan Pusat statistik, baik data nasional maupun data provinsi/kabupaten yang relevan.

Data primer dikumpulkan dengan cara mewawancarai petani dan Pengurus Gapoktan. Wawancara dengan petani menggunakan kuesioner terstruktur, sedangkan wawancara dengan pengurus Gapoktan menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Wawancara juga dilakukan dengan pemangku kepentingan di Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur, Penyuluh Pertanian, dan Penyelia Mitra Tani menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur.

Pengambilan sampel Gapoktan dilakukan secara bertahap: (i) dipilih Gapoktan yang menerima Program PUAP antara 2009-2011, (ii) Gapoktan masih aktif hingga saat ini, (iii) Gapoktan memiliki anggota yang terdiri dari petani pemilik, (iv) Gapoktan memiliki anggota yang tergolong miskin, dan (v) Gapoktan sudah membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Pemilihan Gapoktan dan desa ini dipilih berdasarkan wawancara dengan informan di tingkat kabupaten dan kecamatan serta didukung data dari lembaga terkait.

Sedangkan pengambilan sampel petani padi

dilakukan secara acak sederhana (*simple random sampling*), yaitu diacak petani pemilik penerima Program PUAP di setiap kelompok tani, dan petani pemilik bukan penerima PUAP. Jumlah sampel petani pemilik sebanyak 100 petani yang terdiri dari 50 petani dari kelompok perlakuan (yaitu responden petani padi yang menerima Program PUAP) dan 50 petani dari kelompok kontrol (yaitu responden petani padi yang tidak menerima Program PUAP). Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan efektif dari Bulan Juni hingga Bulan Agustus 2015 di Desa Jati (Kecamatan Bojong Picung) dan Desa Jamali (Kecamatan Mande), Kabupaten Cianjur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan analisis *Double-Difference*, sedangkan metode kualitatif menggunakan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di desa penelitian. Analisis *Double Difference* digunakan untuk menganalisis dampak Program PUAP terhadap peningkatan produksi padi dan pendapatan riil petani di kedua desa penelitian. Analisis data dilakukan melalui dua langkah. Langkah pertama adalah pengolahan data tentang petani penerima Program PUAP dan petani bukan penerima PUAP dengan menggunakan Program Microsoft Excel 2013. Langkah kedua adalah pengolahan data dengan menggunakan program STATA 13.1 untuk mendapatkan nilai *Double-Difference*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Cianjur merupakan satu dari 26 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pada 2010 rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Barat adalah 11,27%, sedangkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Cianjur menunjukkan 14,32%. Dengan demikian nampak bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur masih berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, bahkan tingkat kemiskinan Kabupaten Cianjur juga masih di atas rata-rata nasional sebesar 13,33%.

Untuk melihat kondisi kemiskinan di suatu

wilayah, BPS menggunakan tiga indikator kemiskinan yaitu *head count index*, *poverty gap index*, dan *poverty severity index*. *Head count index* (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. *Poverty gap index* (P1) atau indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Rasio ini digunakan untuk mengukur jarak antara pendapatan rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan pada tahun yang sama. Sedangkan *poverty severity index* (P2) atau indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Berdasarkan ketiga indikator dari BPS tersebut di atas, selama periode 2002 hingga 2013 di Kabupaten Cianjur data jumlah penduduk miskinnya secara absolut selalu menunjukkan penurunan, namun bila dilihat secara persentase atau tingkat kemiskinannya tidak selalu menunjukkan penurunan walaupun selama periode tersebut kecenderungannya menurun. Sejak diluncurkan PUAP pada 2008, tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan dari 15,38% (2008) menjadi 14,14% (2009), namun pada 2010 tingkat kemiskinan meningkat kembali menjadi 14,32% walaupun setelah itu menurun kembali menjadi 12,02% pada 2013 (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur cenderung menurun.

Sedangkan bila dilihat dari indikator indeks kedalaman kemiskinan, di Kabupaten Cianjur juga menunjukkan kecenderungan membaik pada periode 2002-2013, kecuali untuk tahun 2010-2011 indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kenaikan dari 1,66 pada 2009 menjadi 1,85 pada 2010 dan naik kembali menjadi 2,35 pada 2011. Namun demikian pada tahun-tahun berikutnya indeks kedalaman kemiskinan menurun kembali menjadi 2,01 pada 2012 dan 1,70 pada 2013.

Bila dilihat dari indikator indeks keparahan kemiskinan, di Kabupaten Cianjur juga menunjukkan kecenderungan yang hampir

sama dengan kecenderungan pada indeks kedalaman kemiskinan, yaitu menunjukkan kecenderungan menurun kecuali pada tahun 2010 dan 2011. Bila pada 2009 indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,32 maka pada 2010 naik menjadi 0,38 dan naik kembali pada 2011 menjadi 0,64 dan pada tahun-tahun berikutnya menurun menjadi 0,48 pada 2012 dan 0,39 pada 2013. Hal ini berarti bahwa tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Cianjur menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun-tahun 2009-2011.

Pada saat tersebut kondisi berbagai negara di dunia sedang mengalami guncangan ekonomi seperti krisis keuangan global. Dari ketiga indikator kemiskinan tersebut nampak bahwa penurunan angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Cianjur tidak serta merta diikuti dengan membaiknya dua indikator lainnya yaitu indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Sebagai ilustrasi kondisi kemiskinan di Kabupaten Cianjur pada 2010 yang menunjukkan bahwa persentase menurut kategori kemiskinan terdapat 3,36% sangat miskin, 10,96% miskin, 16,72% hampir miskin, dan 68,96% tidak miskin.

Penelitian ini menggunakan jumlah responden petani sebanyak 100 orang yang terdiri dari 50 responden di Desa Jati yaitu desa yang telah memperoleh bantuan Program PUAP dan 50 responden dari Desa Jamali yaitu desa yang tidak memperoleh bantuan Program PUAP. Responden petani bukan penerima BLM-PUAP di Desa Jamali juga sebanyak 50 responden.

Dilihat dari kriteria usia, responden petani penerima BLM-PUAP dan petani Non-PUAP sebagian besar berada pada kisaran umur produktif (15-64 tahun), yaitu 80% baik untuk responden petani PUAP maupun petani Non-PUAP. Namun bila dilihat secara rinci, responden petani PUAP pada kisaran umur (15-54 tahun) lebih banyak dibanding responden petani Non-PUAP yaitu 62 dibanding 46% (Tabel 3).

Demikian juga responden petani PUAP dan responden Non-PUAP yang berumur lebih dari 64 tahun (>64 tahun) memiliki

Tabel 2. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Cianjur, 2002-2013

Tahun	Jml Penduduk Miskin (000)	Angka (%)	Kemiskinan	Kedalaman Kemiskinan (P1)	Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bl)
2002	368,6	18,49	-	-	-	-
2003	388,8	19,05	-	-	-	-
2004	357,9	17,36	-	-	-	-
2005	369,4	17,57	-	-	-	-
2006	415,7	19,81	3,22	0,82	141.603	
2007	394,6	18,49	2,38	0,46	152.748	
2008	334,3	15,38	3,55	1,17	162.645	
2009	311,1	14,14	1,66	0,32	192.176	
2010	310,9	14,32	1,85	0,38	202.438	
2011	306,6	13,82	2,35	0,64	235.202	
2012	292,2	13,18	2,01	0,48	250.032	
2013	267,9	12,02	1,70	0,39	264.580	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data dan Informasi Kemiskinan, berbagai tahun.

persentase yang sama yaitu 20%. Responden petani PUAP yang paling tua berusia 72 tahun, sedangkan responden petani Non-PUAP yang paling tua berusia 80 tahun. Secara umum, rata-rata umur responden petani PUAP dan responden petani Non-PUAP tidak jauh berbeda. Rata-rata umur responden petani PUAP adalah 52,9 tahun, sedangkan rata-rata responden petani Non-PUAP adalah 51,7 tahun.

Dilihat dari kriteria pendidikan, baik responden petani penerima Program PUAP maupun responden petani Non-PUAP sebagian besar merupakan lulusan sekolah dasar (SD) yaitu 78% responden petani PUAP dan 86% responden petani Non-PUAP (Tabel 4).

Setelah paling banyak lulusan SD, urutan kedua terbanyak responden petani PUAP adalah lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (14%), diikuti responden yang tidak sekolah/tidak tamat SD (4%), dan masing-masing 2% responden lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan perguruan tinggi. Sedangkan responden petani Non-PUAP urutan kedua terbanyak adalah lulusan SLTP (12%), dan lulusan SLTA (2%).

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa responden petani penerima Program PUAP lebih bervariasi dibandingkan dengan responden petani non-penerima Program PUAP.

Terdapat 4% responden penerima PUAP yang tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD, sedangkan responden petani non-penerima PUAP tidak satupun yang tidak sekolah atau tidak tamat SD. Demikian juga untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, terdapat 2% responden petani penerima PUAP yang berpendidikan atau lulusan dari diploma atau universitas, sedangkan responden petani non-penerima PUAP tidak ditemukan satupun yang lulus dari diploma atau universitas.

Responden petani sengaja dipilih secara purposif yaitu petani yang telah memiliki pengalaman sebagai petani. Namun demikian, petani dapat dikelompokkan ke dalam petani yang telah lama bertani (>10 tahun), pengalaman bertani cukup lama (8-10 tahun), pengalaman petani sedang (6-8 tahun), dan pengalaman petani 6 tahun yaitu sejak Program PUAP digulirkan di Kabupaten Cianjur.

Pada umumnya responden memiliki pengalaman sebagai petani lebih dari 10 tahun yaitu 76% responden petani PUAP dan 36% responden petani Non-PUAP. Di urutan kedua adalah petani berpengalaman cukup lama (8-10 tahun) yaitu 20% responden petani PUAP dan 34% responden petani Non-PUAP.

Sedangkan petani yang sedikit pengalaman sebagai petani (6-8 tahun) sebanyak 4%

Tabel 3. Rentang usia responden petani PUAP dan petani non PUAP

Rentang Usia (tahun)	Petani PUAP		Petani Non PUAP	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
<15	0	0	0	0
15 s/d 54	31	62	23	46
54 s/d 64	9	18	17	34
>64	10	20	10	20
Total	50	100	50	100

Sumber: Data primer, diolah

adalah responden petani PUAP dan 30 responden petani Non-PUAP. Secara umum, responden petani PUAP memiliki rata-rata pengalaman sebagai petani selama 22,9 tahun, sedangkan responden petani Non-PUAP memiliki pengalaman rata-rata sebagai petani selama 12,4 tahun (Tabel 5).

Responden petani, baik petani PUAP maupun petani Non-PUAP memiliki kegiatan ekonomi selain sebagai petani. Namun demikian, sebagian besar pekerjaan responden adalah hanya sebagai petani padi, yaitu 72% responden petani PUAP dan 84% responden petani Non-PUAP.

Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian responden petani PUAP memiliki pekerjaan lain selain sebagai petani yaitu sebagai peternak (seperti ternak ikan) sebanyak 8%, pedagang atau pengepul (8%), buruh/tukang bangunan atau kuli (6%), karyawan swasta (4%), dan operator *hand tractor* (2%). Sedangkan pekerjaan lain selain sebagai petani untuk responden petani Non-PUAP adalah pekerjaan sebagai pedagang (6%), karyawan swasta (6%), dan buruh/tukang bangunan/kuli (2%).

Selain itu, terdapat pula beberapa petani yang memiliki pasangan yang juga bekerja. Dari 50 responden petani PUAP hanya terdapat 2 (dua) orang atau 4% pasangannya yang bekerja yaitu sebagai guru sekolah dasar dan sebagai buruh tani, sedangkan yang lainnya tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga. Bahkan responden petani Non-PUAP seluruh pasangannya tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga.

Pendapatan per kapita per bulan yang diperoleh petani di Desa Jati yaitu petani penerima Program PUAP lebih tinggi

daripada pendapatan petani di Desa Jamali yaitu desa yang tidak menerima Program PUAP. Rata-rata pendapatan per kapita per bulan di Desa Jati sebagian besar, yaitu 62 persen pada 2009 dan 58 persen pada 2014, masih berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Cianjur.

Demikian pula pendapatan per kapita per bulan di Desa Jamali juga sebagian besar, yaitu 96 persen pada 2009 dan 94 persen pada 2014, masih berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Cianjur.

Dengan demikian, pendapatan per kapita per bulan di Desa Jati dan di Desa Jamali mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berada di atas garis kemiskinan Kabupaten Cianjur, masing-masing dari 38 persen (2009) menjadi 42 persen (2014) di Desa Jamali dan peningkatan dari 4 persen menjadi 6 persen di Desa Jati (Tabel 7).

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Cianjur pada 2008. Pada saat itu terdapat 41 desa yang menerima bantuan langsung masyarakat PUAP (BLM-PUAP). Kemudian pada tahun-tahun berikutnya terdapat 102 desa (2009), 89 desa (2010), 70 desa (2011), 13 desa (2012), 10 desa (2013), dan 9 desa (2014) yang menerima bantuan BLM-PUAP sehingga pada 2014 secara total sudah terdapat 334 desa yang telah menerima BLM-PUAP dari 354 desa yang ada di Kabupaten Cianjur atau 94% desa di Kabupaten Cianjur sudah menerima bantuan BLM-PUAP. Nilai bantuan BLM PUAP adalah sebesar Rp100 juta per desa atau per Gapoktan. Salah satu penerima BLM-PUAP pada 2009 adalah Gapoktan Warga Tani yang berada di Desa Jati, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur.

Gapoktan Warga Tani di Desa Jati, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur memperoleh dana bantuan BLM-

PUAP pada 2009. Gapoktan Warga Tani merupakan gabungan dari 9 (sembilan) kelompok tani yang ada di Desa Jati. Kesembilan kelompok tani tersebut adalah Kelompok Tani Berkah Sawargi, Karya Tani, Sugih Mukti, Harapan, Mekar Tani, Silih Asih, Tani Mukti, Subur, dan Kelompok Tani Harapan Mukti (Tabel 8).

Pada 2009 jumlah anggota Gapoktan Warga Tani sebanyak 39 orang, namun setelah itu keanggotaan Gapoktan Warga Tani mengalami peningkatan jumlah anggota menjadi 134 (2010), 209 (2011), 243 (2012), 260 (2013), dan menjadi 275 orang pada 2014. Peningkatan jumlah anggota Gapoktan ini disebabkan adanya anggota baru yang masuk menjadi anggota kelompok tani yaitu ada penambahan anggota sebanyak 75 anggota baru pada 2011, 34 anggota baru pada 2012, 17 anggota baru pada 2013, dan 15 anggota baru pada 2014. Selain itu terdapat kelompok tani baru yang dibentuk pada 2012 yaitu kelompok tani Harapan Mukti dengan jumlah anggota 6 orang dan bertambah menjadi 16 orang pada 2014.

Seluruh anggota kelompok tani sekaligus menjadi anggota Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), yaitu sebanyak 39 pada 2009, kemudian bertambah dengan 95 anggota baru pada 2010, 75 anggota baru pada 2011, 34 anggota baru pada 2012, 17 anggota baru pada 2013, dan 15 anggota baru pada 2014 sehingga total anggota LKM-A sebanyak 275 orang.

Gapoktan Warga Tani membentuk LKM-A dalam bentuk koperasi yaitu Koperasi Warga Tani pada 2014. Kepengurusan Koperasi terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi LKM-A. Selain itu terdapat pula Komite Pengarah yang terdiri atas ketua dan dua anggota. Pembentukan Koperasi Warga Tani ini adalah untuk melayani masyarakat yang memiliki usaha kecil atau bakulan, melayani

petani kecil dalam penyediaan sarana produksi, dan melayani usaha produksi peternakan, perikanan, dan industri rumah tangga yang termasuk ke dalam anggota Gapoktan Warga Tani.

Pembentukan LKM-A dalam bentuk koperasi sebagai badan hukum dengan mempertimbangkan persyaratan yang diperlukan yang memungkinkan untuk dapat dipenuhi oleh Gapoktan Warga Tani. Pembentukan LKM-A dalam bentuk koperasi ini merupakan kesepakatan antara PMT dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan kondisi Gapoktan Warga Tani. Biaya pembentukan koperasi LKM-A sebesar Rp2.000.000 yang digunakan untuk biaya notaris.

Koperasi Warga Tani memiliki modal awal sebesar Rp100 juta yang berasal dari bantuan modal BLM PUAP dari Kementerian Pertanian. Dengan dibentuknya koperasi tersebut, setiap anggota menyimpan ke koperasi berupa simpanan pokok sebesar Rp50.000 yang dibayarkan satu kali, simpanan wajib, dan tabungan. Hingga Desember 2014, modal usaha Koperasi LKMA Warga Tani sudah mencapai Rp100.000.000 lebih, yang terdiri dari Rp100.000.000 merupakan bantuan BLM PUAP, Rp13.750.000 merupakan simpanan pokok anggota, Rp16.682.900 merupakan dana cadangan, Rp20.290.000 merupakan dana titipan atau tabungan anggota, dan Rp5.667.000 merupakan dana infak.

Keberadaan Koperasi Warga Tani telah membantu petani anggota koperasi ini untuk mendapatkan pinjaman modal khususnya saat mulai musim tanam. Umumnya petani meminjam Rp600.000 di awal musim sebagai modal pembelian pupuk dan dibayar saat panen padi.

Dengan adanya koperasi ini, PMT dan Dinas

Tabel 4. Tingkat pendidikan responden petani penerima PUAP dan non penerima PUAP

Tingkat Pendidikan	Petani PUAP		Petani Non PUAP	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak sekolah/tidak tamat SD	2	4	0	0
Tamat SD	39	78	43	86
Tamat SLTP	1	2	6	12
Tamat SLTA	7	14	1	2
Diploma/sarjana	1	2	0	0
Total	50	100	50	100

Sumber: Data primer, diolah

Tabel 5. Pengalaman bertani bagi petani penerima PUAP dan non penerima PUAP

Pengalaman bertani	Petani Penerima PUAP		Petani Non Penerima PUAP	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
6 – 8	2	4	15	30
8 - 10	10	20	17	34
>10	38	76	18	36
Total	50	100	50	100

Sumber: Data primer, diolah

Tabel 6. Pekerjaan lain selain bertani bagi petani penerima PUAP dan non penerima PUAP

Pekerjaan selain bertani	Petani Penerima PUAP		Petani Non Penerima PUAP	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Bertani saja	36	72	42	84
Operator <i>hand tractor</i>	1	2	0	0
Buruh/tukang bangunan/kuli	3	6	1	2
Dagang/pengepul	4	8	3	6
Ternak (ikan dsb)	4	8	0	0
Karyawan swasta	2	4	3	6
Wiraswasta	0	0	1	2
Total	50	100	50	100

Sumber: Data primer, diolah

Pertanian Hortikultura, serta Pengurus Gapoktan merencanakan mengembangkan koperasi di masa depan untuk dapat mengakses kepada lembaga keuangan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang ada di Kabupaten Cianjur.

Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan modal yang telah diterima dari BLM-PUAP antara lain melalui akses program-program pemerintah lainnya untuk pengembangan modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Secara skematis, rencana pengembangan modal tersebut dapat dilihat pada Gambar 11. Bantuan BLM-PUAP dari Kementerian Pertanian kepada Gapoktan sebesar Rp100 juta digunakan untuk membiayai usaha petani kelompok pertanian (Poktan). Pada awalnya petani meminjam uang ke

Gapoktan untuk usaha taninya, misalnya membeli pupuk. Setelah satu tahun, dengan bimbingan PMT, Gapoktan membuat unit simpan pinjam bagi anggota-anggotanya. Setelah unit simpan pinjam berjalan, Gapoktan mendirikan lembaga keuangan mikro agribisnis untuk mengelola kegiatan simpan pinjam. Setelah terbentuk LKM-A, misalnya koperasi, maka LKM-A dapat mengakses lembaga perbankan dan berbagai program pemerintah yang *channelingnya* melalui perbankan seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E), kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP), kredit usaha pembibitan sapi (KUPS).

Dari wawancara mendalam diperoleh

Tabel 7. Pendapatan per kapita per bulan petani penerima PUAP dan non penerima PUAP

Pendapatan/kapita/bulan (Rp)	Petani Penerima PUAP		Petani Non Penerima PUAP	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tahun 2009 (GK Kab=192.176)				
Di bawah GK	31	62	48	96
Di atas GK	19	38	2	4
Tahun 2014 (GK Kab=280.501)				
Di bawah GK	29	58	47	94
Di atas GK	21	42	3	6

Sumber: Data primer, diolah

informasi bahwa petani penerima BLM-PUAP memiliki keuntungan dari adanya program PUAP tersebut. Sebelum tahun 2009, petani di Desa Jati, khususnya petani miskin, untuk membiayai usaha taninya meminjam sarana produksi kepada pemilik modal di desa tersebut. Sistem peminjaman dan pengembalian dikenal dengan 'sistem yarnen' yaitu bahwa dalam satu musim petani meminjam 1 kwintal pupuk dan dibayar pada saat panen berupa 1 kwintal padi. Namun sejak memperoleh bantuan BLM-PUAP, petani tidak lagi meminjam

kepada pemilik modal.

Dengan adanya bantuan BLM-PUAP, petani penggarap (baik sawah milik sendiri maupun sawah garapan), memperoleh bantuan BLM-PUAP sebesar Rp600.000 dengan sistem pengembalian dengan cara bagi hasil 2% per bulan. Untuk pinjaman Rp600.000 selama 4 bulan, maka petani mengembalikan pinjaman pokok Rp600.000 ditambah bagi hasil sebesar Rp48.000 sehingga saat panen membayar total pinjaman sebesar Rp648.000.

Dari 50 responden petani penerima PUAP seluruhnya menyatakan bahwa bantuan dana BLM-PUAP bermanfaat dengan bahasa responden masing-masing yaitu dapat mengurangi beban dalam berusaha tani (40%), atau sangat membantu/menunjang usaha taninya (60%). Walaupun sebagian besar responden petani PUAP menyatakan bantuan tersebut masih terlalu kecil (18%), kurangnya tambahan modal (52%), atau tidak menyebutkan kelemahan bantuan BLM-PUAP (20%).

Manfaat PUAP sangat dirasakan oleh petani bila dibandingkan dengan pembiayaan usahataniannya dibiayai dari pinjaman ke pemilik modal di tingkat desa/kecamatan. Sebelum ada pinjaman PUAP, petani

meminjam ke pemilik modal berupa sarana produksi selama 1 (satu) musim tanam dengan pembayaran dilakukan setelah panen (*yarnen*) yaitu berupa 1 (satu) kuintal pupuk (dua macam pupuk) atau setara dengan Rp200.000 dibayar dengan 1 (satu) kuintal padi pada saat panen atau setara dengan Rp300.000. Sedangkan pinjaman BLM-PUAP, pada tahun pertama PUAP jumlah pinjaman Rp600.000 yang dibayarkan secara yarnen sebesar Rp648.000.

Dengan memperbandingkan jumlah pinjaman yang sama, yaitu Rp600.000, maka jika meminjam kepada pemilik modal harus mengembalikan Rp900.000 sedangkan jika petani meminjam dari BLM-PUAP akan mengembalikan Rp648.000. Dengan demikian terdapat perbedaan sebesar Rp252.000 per musim untuk pinjaman modal sebesar Rp600.000. Secara persentase hal ini terdapat perbedaan sebesar 10,5 titik persen (*percentage point*) yaitu perbedaan antara bagi hasil BLM PUAP sebesar 2% per bulan dengan 12,5% per bulan jika meminjam ke pemilik modal.

Perbedaan bagi hasil atau bunga yang cukup besar ini sangat memberatkan bagi petani, khususnya petani kecil atau miskin yang ada di perdesaan. Dana BLM-PUAP yang dipinjam petani secara bergiliran menunjukkan jumlah dana BLM-PUAP masih sangat terbatas baik besarnya maupun cakupan petani yang dapat meminjam BLM-PUAP tersebut.

Metode kuantitatif dalam menganalisis dampak program PUAP terhadap peningkatan pendapatan petani menggunakan metode *Double-Difference*. Metode ini mensyaratkan adanya keadaan dalam dua periode waktu, sebelum dan

Tabel 8. Perkembangan Jumlah Anggota Gapoktan Warga Tani menurut Kelompok Tani, 2010-2014

	Nama Kelompok	Jumlah Anggota				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Berkah Sawargi	33	57	68	68	73
2	Karya Tani	21	28	33	33	34
3	Sugih Mukti	14	15	17	17	18
4	Harapan	12	22	24	24	25
5	Mekar Tani	14	25	27	34	39
6	Silih Asih	17	20	22	22	22
7	Tani Mukti	14	16	17	17	18
8	Subur	9	26	29	29	30
9	Harapan Mukti	0	0	6	16	16
	Jumlah	134	209	243	260	275

Sumber: Gapoktan Warga Tani, Desa Jati, Kecamatan Bojong Picung, 2015.

sesudah intervensi, dalam kelompok perlakuan (*a treatment group*) serta dalam kelompok kontrol (*a comparison group*). Bentuk intervensi dalam penelitian ini adalah adanya bantuan BLM Program PUAP.

Oleh karena itu, pemilihan periode waktu dipilih tahun 2009 dan 2014 yang menunjukkan bahwa tahun 2009 adalah keadaan petani sebelum memperoleh Program PUAP, sedangkan tahun 2014 menunjukkan kondisi petani setelah pelaksanaan program PUAP. Kelompok petani Desa Jati penerima BLM-PUAP sebagai kelompok perlakuan, dan kelompok petani Desa Jamali yang tidak menerima BLM-PUAP sebagai kelompok kontrol. Kerangka metode *Double-Difference* untuk menghitung dampak Program PUAP terhadap perubahan produksi padi per hektar ditunjukkan oleh persamaan (1) berikut:

Double Difference:
 Dampak = $(Q_{T2}-Q_{T1}) - (Q_{C2}-Q_{C1})$
(1)

Dengan:

Q_{T2} = Produksi padi (gabah kering punggut) per hektar petani di Desa Jati pada 2014 (setelah menerima program PUAP)

Q_{T1} = Produksi padi (gabah kering punggut) per hektar petani di Desa Jati pada 2009 (sebelum menerima program PUAP)

Q_{C2} = Produksi padi (gabah kering punggut) per hektar petani di Desa Jamali pada 2014 (setelah desa Jati menerima program PUAP tetapi Desa Jamali tidak menerima Program PUAP).

Q_{C1} = Produksi padi (gabah kering punggut) per hektar petani di Desa Jamali pada 2009 (sebelum desa Jati menerima program PUAP)

Tahun yang dipilih untuk produksi padi per hektar sebelum Program PUAP adalah kondisi produksi per hektar pada 2009 dan produksi padi per hektar setelah Program PUAP dipilih kondisi pada 2014. Rentang waktu 2009-2014 ini diharapkan sudah ada dampak dari adanya bantuan BLM-PUAP. Produksi padi per hektar petani penerima Program PUAP maupun petani bukan penerima Program PUAP diperoleh dari hasil gabah kering punggut yang dihasilkan oleh petani di masing-masing desa. Perhitungan produksi padi per hektar dilakukan dengan

menyamakan luas panen bagi setiap petani adalah satu hektar, dengan rumus:

$$Q_{2i} = Q_{1i} \cdot \frac{10.000}{L_i}$$

Dengan Q_{2i} adalah produksi padi kering punggut per hektar petani ke-i, Q_{1i} adalah produksi padi kering punggut yang dihasilkan petani ke-i, dan L_i adalah luas panen petani ke-i.

Analisis *Double-Difference* dilakukan dengan menghitung masing-masing perubahan produksi padi per hektar petani di Desa Jati dan Desa Jamali antara tahun 2009 dengan produksi padi per hektar petani di kedua desa tersebut pada 2014. Tabel 9 menunjukkan adanya rata-rata peningkatan produksi padi per hektar di Desa Jati sebesar 770,22 kg dan begitu pula di Desa Jamali, ternyata produksi padi per hektar juga mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sebesar 129,08 kg pada periode 2009-2014. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana dampak Program PUAP terhadap peningkatan produksi padi per hektar maka langkah selanjutnya adalah mendapatkan nilai *Double-Difference* yaitu dengan menghitung selisih rata-rata peningkatan produksi padi per hektar di Desa Jati dan rata-rata peningkatan produksi padi per hektar di Desa Jamali. Hasilnya nilai *Double-Difference* adalah 641,14 kg dan signifikan pada $\alpha = 1\%$. Hal ini menunjukkan bahwa Program PUAP telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi padi per hektar di Desa Jati 641,14 kg lebih besar dibandingkan dengan Desa Jamali yang tidak menerima Program PUAP. Analisis dampak program PUAP terhadap peningkatan pendapatan petani juga menggunakan metode *Double-Difference*, dengan persamaan berikut:

Double Difference:
 Dampak = $(R_{T2}-R_{T1}) - (R_{C2}-R_{C1})$ (3)

Dengan:

R_{T2} = Pendapatan riil petani Desa Jati pada 2014 (setelah menerima program PUAP)

R_{T1} = Pendapatan riil petani Desa Jati

pada 2009 (sebelum menerima program PUAP)

R_{C2} = Pendapatan riil petani Desa Jamali pada 2014 (setelah ada program PUAP tetapi tidak menerima Program PUAP)

R_{C1} = Pendapatan riil petani Desa Jamali pada 2009 (sebelum ada program PUAP)

Sebelum Program PUAP dipilih kondisi petani pada 2009 dan setelah Program PUAP dipilih kondisi petani pada 2014. Rentang waktu 2009-2014 ini diharapkan sudah ada dampak dari adanya bantuan BLM-PUAP.

Pendapatan usaha tani, baik petani penerima Program PUAP maupun petani bukan penerima Program PUAP dihitung berdasarkan pendapatan kotor (volume produksi dikalikan harga) dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya benih, pembelian pupuk, biaya tenaga kerja, biaya penyediaan, biaya penyemprotan, biaya panen, dan biaya-biaya tetap yang dikeluarkan untuk usaha taninya. Selisih antara pendapatan kotor dengan biaya-biaya tersebut merupakan pendapatan bersih bagi petani. Pendapatan bersih kemudian di-indeks untuk menghilangkan pengaruh kenaikan harga, sehingga didapatkan pendapatan riil.

Analisis *Double-Difference* adalah menghitung masing-masing perubahan pendapatan riil petani di Desa Jati dan Desa Jamali antara tahun 2009 dengan pendapatan riil petani tahun 2014. Tabel 10 menunjukkan adanya rata-rata peningkatan pendapatan petani di Desa Jati sebesar Rp1.084.616 dan begitu pula di Desa Jamali, ternyata pendapatan petani juga meningkat, yaitu sebesar Rp206.258. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana dampak Program PUAP terhadap peningkatan pendapatan petani maka langkah selanjutnya adalah mendapatkan nilai *Double-Difference* yaitu dengan menghitung selisih rata-rata peningkatan pendapatan petani di Desa Jati dan rata-rata peningkatan pendapatan petani di Desa Jamali. Hasilnya nilai *Double-Difference* adalah Rp878.358 dan signifikan pada $\alpha = 1\%$. Hal ini menunjukkan bahwa Program

PUAP telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani di desa Jati Rp878.358 lebih besar dibandingkan dengan desa Jamali yang tidak menerima Program PUAP.

Dampak Program PUAP terhadap peningkatan produksi dan pendapatan riil tersebut disebabkan: (1) adanya perubahan penggunaan bibit yang bervariasi pada sebelum Program PUAP menjadi bibit varietas unggul yang memiliki rendemen tinggi yaitu mencapai 60 kilogram per kuintal gabah; (2) perubahan teknologi tanam dari sistem tegel menjadi sistem jajar legowo; (3) perubahan cara penjualan gabah kering punggut dari penualan ke tengkulak menjadi penjualan kepada pengelola usaha penggilingan padi; (4) adanya pendampingan dari PMT dalam pembukuan dan simpan pinjam; (5) biaya pembelian pupuk lebih murah karena adanya perubahan sistem dari *yarnen* atau dibayar setelah panen menjadi pembelian pupuk secara tunai; dan (6) harga jual gabah kering punggut lebih tinggi.

Dengan demikian nampak bahwa Program PUAP memiliki dampak yang signifikan untuk peningkatan produksi padi dan pendapatan petani. Namun demikian, peningkatan pendapatan riil yang diperoleh petani padi di Desa Jati ini perlu diperbandingkan dengan Garis kemiskinan di Kabupaten Cianjur untuk mengetahui apakah dengan Program PUAP ini petani penerima program sudah dapat melewati garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah dalam kurun waktu 2009-2014.

Analisis *Double Difference* menunjukkan bahwa Program PUAP telah berhasil meningkatkan pendapatan petani, namun rata-rata pendapatan per kapita per bulan di Desa Jati (yaitu sebesar Rp261.481) ternyata masih berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Cianjur (yaitu sebesar Rp280.501 per kapita per bulan) pada 2014 (Tabel 11). Rata-rata pendapatan per kapita di Desa Jati masih berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Cianjur.

Pada 2009 rata-rata pendapatan per kapita

Tabel 9. Rata-rata Perubahan Produksi/ha dan Pendapatan Riil di Desa Jati dan Desa Jamali: Metode *Double-Difference*

	Rata-rata Perubahan Proporsional, 2009-2014			t-hitung	
	Desa	Jati	Desa Jamali (Non-PUAP)		
Produksi/ha (kg)	770,22		129,08	641,14**	2,6871

Sumber: Diolah dari data primer

petani per bulan di Desa Jati sebesar Rp167.986 masih berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan sebesar Rp192.176. Pada 2009 masih terdapat 62 persen yang berada di bawah garis kemiskinan dan pada 2014 masih terdapat 58 persen yang berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan wawancara kualitatif diperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Program PUAP di Kabupaten Cianjur yang perlu dicermati dan dicarikan solusi terbaik untuk pengurangan kemiskinan di perdesaan di masa mendatang. Kekuatan Program PUAP yang dapat diidentifikasi adalah: (1) beberapa kelompok tani sudah memiliki lembaga keuangan mikro-agribisnis LKM-A) yang profesional sehingga petani lebih mudah mengakses bantuan modal; (2) adanya pendampingan khusus dari penyelia mitra tani (PMT) sehingga pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman petani semakin meningkat; dan (3) terdapat system pengadministrasian yang baku atau ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan pelaksanaan program diawasi langsung oleh dinas pertanian.

Sedangkan kelemahan-kelemahan yang muncul dari pelaksanaan Program PUAP adalah: (1) kepemilikan lahan petani yang sempit sehingga tidak efisien; (2) dana bantuan yang diberikan kepada petani masih kurang, sehingga belum semua desa dan semua petani mendapatkan bantuan; (3) secara umum para petani belum memenuhi persyaratan perbankan, sehingga bank belum memberikan kredit kepada petani; (4) akses petani terhadap program-program pemerintah di luar kementerian Pertanian dan perbankan masih kurang; (5) pengurus kelompok tani tidak memiliki keterampilan

penggunaan teknologi informasi dan masih sulit mengakses jaringan internet; dan (6) kelembagaan di tingkat petani masih lemah.

Berdasarkan identifikasi kekuatan dan kelemahan tersebut, faktor sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan faktor-faktor tersebut melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan tentang usaha agribisnis, baik yang berkaitan dengan teknis produksi maupun manajemen usaha taninya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas disimpulkan bahwa Program PUAP memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produksi padi dan pendapatan petani PUAP dibandingkan dengan petani non-PUAP. Nilai *Double Difference* untuk produksi padi desa penerima Program PUAP dibandingkan desa yang tidak menerima Program PUAP sebesar 641,14 kg, dan untuk pendapatan riil sebesar Rp878.358. Namun demikian, rata-rata pendapatan perkapita petani di desa penerima Program PUAP masih berada di bawah garis kemiskinan Kabupaten Cianjur.

Terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap masih rendahnya pendapatan petani per kapita per bulan di desa penerima PUAP. Kelemahan-kelemahan yang menyangkut kelemahan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia.

Oleh karena itu Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura perlu mengembangkan sumber daya manusia, mulai dari petani, pengurus kelompok tani maupun gabungan kelompok

Tabel 10. Rata-rata Perubahan Produksi/ha dan Pendapatan Riil di Desa Jati dan Desa Jamali: Metode Double-Difference

	Rata-rata Perubahan Proporsional, 2009-2014			t-hitung
	Desa Jati (PUAP)	Desa Jamali	DD/se	
Pendapatan Riil (Rp)	1.084.616	206.258	878.358**	3,2818

Sumber: Diolah dari data primer
Catatan: t_{tabel} pada $\alpha = 1\%$ adalah 2,617

Tabel 11. Pendapatan per kapita per bulan di Desa Jati dan Jamali, serta Garis Kemiskinan Kab. Cianjur, 2009 dan 2014 (Rp)

	Pendapatan/kapita/bl (Rp)	
	2009	2014
Desa Jati	167.986	261.481
Desa Jamali	60.891	90.764
Garis Kemiskinan Kab Cianjur	192.176	280.501

Sumber: BPS dan data primer, diolah

tani, serta penyuluh dan penyelia mitra tani perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

Walaupun pengembangan sumber daya manusia ini sudah mulai dilakukan, namun dalam pembangunan agribisnis perlu pembinaan kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek bisnis, manajerial, dan organisasi bisnis petani serta peningkatan wawasan agribisnis. Hal ini dapat dilakukan Balai Penyuluhan Pertanian dengan membentuk unit khusus yang memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan tentang usaha agribisnis, baik yang berkaitan dengan teknis produksi maupun manajemen usaha taninya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Asep Suryahadi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan lanjutan pada Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Prof Dr Ir Hermanto Siregar, MEd dan Prof Dr Ir M Parulian Hutagaol, MS yang telah membimbing penulisan tesis mulai dari pembuatan proposal hingga analisisnya,

sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anriquez, G. dan Stamoulis, K. (2007). *Rural Development and poverty reduction: is agriculture still the key?* Electronic Journal of Agriculture and Development Economics. Vol. 4 No. 1, 2007, pp.5-46.
- Anggriani, T.W. (2012). Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Tesis. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.
- Ariyati, F. (2011). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). FOCUS Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2011.
- [BPS] Badan Pusat Statistik (2010) 'Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009', Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik (2009b) *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2008* [Poverty Data and Information 2008] Book 1: Province, Jakarta: BPS.
- [BPS] Badan Pusat Statistik (2009c) *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2008* [Poverty Data and Information 2008] Book 2: Kabupaten/Kota. Jakarta: BPS.
- Burhansyah, R. (2010). Pemberdayaan Gapoktan PUAP Kalimantan Barat

- Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Petani di Pedesaan.
- Godoy, D.C. dan Dewbre, J. (2010). *Economic Importance of Agriculture for Sustainable Development and Poverty Reduction: Findings from a case Study of Indonesia*. OECD. Global Forum on Agriculture.
- Kamira, D., Nur, M., dan Tan, F. (2011). Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kota Padang. Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas..
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2014. Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2014. Jakarta (ID). Kementan.
- Sekretariat PUAP, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. (2012). Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2012.
- [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program, Klaster I, Klaster II, Klaster III dalam <http://www.tnp2k.go.id/id/program/>